

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI URBANISASI DI KOTA MAKASSAR

OCHTMAN VALDIMAS



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI URBANISASI DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**OCHTMAN VALDIMAS
A11115302**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI URBANISASI DI KOTA MAKASSAR

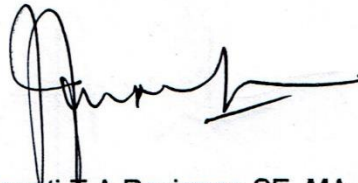
disusun dan diajukan oleh:

OCHTMAN VALDIMAS
A11115302

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

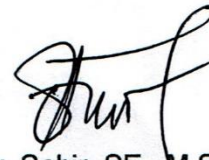
Makassar, 12 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Indraswati T.A.Revianne, SE., MA., CWM
NIP 19651012 199903 2 001

Pembimbing II



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM.
NIP 19740715 200212 1 003



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fatah, SE., M.Si., CSF., CWM.
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI URBANISASI DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

OCHTMAN VALDIMAS
A11115302

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 Juni 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|------------|---|
| 1 | Dr. Indraswati. T.A. Reviane,SE.,MA.,CWM. | Ketua | 1  |
| 2 | Dr. Sabir,SE.,M.Si.,CWM. | Sekretaris | 2  |
| 3 | Dr. Nur Dwiana Sari Saudi,SE.,M.Si.,CWM. | Anggota | 3  |
| 4 | Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus,SE.,M.Si. | Anggota | 4  |

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Fattah,SE.,M.Si.,CSF.,CWM.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : OCHTMAN VALDIMAS
NIM : A11115302
Departemen/ Program Studi : ILMU EKONOMI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI URBANISASI DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Ochtman Valdimas

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Indraswati T.A.Reviane,SE.,NA.,CWM dan Bapak Dr. Sabir, SE.,M.Si.,CWM sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapkan terima kasih juga kepada Badan Pusat Statistik Kota Makassar atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data-data statistik yang dipublikasi. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si.,CWM yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan agar penelitian ini segera terselesaikan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Alm. Ayah dan Ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuanyang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Makassar, 24 Juni 2022

Ochtman Valdimas

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Urbanisasi Di Kota Makassar

Factors Affecting Urbanization in Makassar City

Ochtman Valdimas
Indraswati T.A. Reviane
Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi urbanisasi di Kota Makassar dengan urbanisasi sebagai variabel dependen dan PDRB, upah minimum dan kesempatan kerja sebagai variabel independen. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data urbanisasi, PDRB, upah minimum, dan kesempatan kerja yang dimulai dari tahun 2009-2020 yang bersumber dari BPS Kota Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan bantuan *software SPSS* versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap urbanisasi, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi, dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi.

Kata Kunci: Urbanisasi, PDRB, Upah Minimum, Kesempatan Kerja

This study aims to analyze the factors that influence urbanization in Makassar City with urbanization as the dependent variable and GDP, minimum wages and job opportunities as independent variables. The data sources in this study are secondary data in the form of urbanization data, GRDP, minimum wages, and job opportunities starting from 2009-2020 which are sourced from BPS Makassar City. The data analysis method used is Multiple Regression with the help of SPSS version 26 software. The results of this study indicate that GRDP does not have a significant effect on urbanization, the minimum wage has a positive and significant effect on urbanization, and employment opportunities have a positive and significant effect on urbanization.

Keywords: Urbanization, GRDP, Minimum Wage, Job Opportunities

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Tinjauan Teoritik | 6 |
| 2.1.1. Teori Urbanisasi | 6 |
| 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto..... | 9 |
| 2.1.3. Upah Minimum | 13 |
| 2.1.4. Kesempatan Kerja | 17 |
| 2.2. Hubungan Antar Variabel..... | 20 |
| 2.2.1. Hubungan PDRB terhadap Urbanisasi | 20 |
| 2.2.2. Hubungan Upah Minimum terhadap Urbanisasi..... | 21 |
| 2.2.3. Hubungan Kesempatan Kerja terhadap Urbanisasi | 22 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu | 23 |
| 2.4. Kerangka Pikir Penelitian | 25 |
| 2.5. Hipotesis Penelitian | 26 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 27 |
| 3.1. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| 3.2. Jenis Data dan Sumber Data | 27 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 27 |
| 3.4. Metode Analisis Data | 28 |
| 3.5. Pengujian Hipotesis | 29 |
| 3.6. Definisi Operasional Variabel..... | 30 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian | 31 |
| 4.2. Perkembangan Variabel Penelitian | 34 |
| 4.3. Hasil Estimasi Penelitian..... | 41 |
| 4.4. Pembahasan Hasil Penelitian | 44 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 48 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 48 |
| 5.2 Saran..... | 49 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 50 |
| LAMPIRAN..... | 53 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1.1 Data Jumlah Penduduk, Urbanisasi dan Kesempatan Kerja Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2020..... | 2 |
| 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pendudukan Kota Makassar Tahun 2009 – 2020..... | 33 |
| 4.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Urbanisasi Penduduk Kota Makassar Tahun 2009 – 2020..... | 36 |
| 4.3 Perkembangan PDRB di Makassar Tahun 2009 – 2020..... | 37 |
| 4.4 Perkembangan UMK di Makassar dan Perbandingannya dengan UMK Tana Toraja Tahun 2009-2020..... | 39 |
| 4.5 Perkembangan Kesempatan Kerja di Makassar Tahun 2009 – 2020 | 41 |
| 4.6 Rekapitulasi Data Hasil Regresi Linear Berganda..... | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--------------------------|---------|
| 2.1. Kerangka Pikir..... | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan pembangunan di era globalisasi saat ini terutama di wilayah perkotaan Indonesia dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak menjadikan wilayah kota (urban) menjadi magnet bagi banyak orang untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Perpindahan penduduk biasanya dilakukan karena faktor pekerjaan atau desakan ekonomi. Minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal mendorong penduduk untuk pindah ke daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang banyak dengan upah yang lebih baik.

Mobilitas kependudukan pada umumnya didasari dengan pertimbangan bahwa daerah sekarang kurang berpotensi dibanding daerah tujuan. Selain diakibatkan oleh motif ekonomi, kondisi geografis juga memiliki pengaruh penting bagi seseorang untuk melakukan perpindahan. Adanya perbedaan daya dukung lingkungan berdampak pada perbedaan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya pada wilayah tersebut. Sehingga penduduk yang tinggal pada daerah yang daya dukung lingkungannya rendah akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja di daerah lain maupun pindah secara permanen (Puspitosari, 2014). Lebih lanjut, mobilitas kependudukan bisa juga didasari oleh motif psikologi yaitu stres yang merupakan perkembangan dari motif ekonomi dan geografis. Apabila stres seseorang berada diluar batas toleransinya, orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah lain di tempat kebutuhannya dapat terpenuhi, atau dengan ungkapan lain, seseorang akan pindah dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan

wilayah (*place utility*) lebih rendah ke daerah yang mempunyai nilai kefaedahanwilayah lebih tinggi dimana kebutuhannya dapat terpenuhi (Mantra, 2013).

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan khususnya kota Makassar senantiasa bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diakibatkan karena pembangunan yang berpusat di Kota Makassar dan juga diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk dari luar daerah untuk berdatangan baik dengan maksud berdomisili maupun hanya untuk mencari pekerjaan. Proses perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan inilah yang disebut urbanisasi.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk, Urbanisasi dan Kesempatan Kerja Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2020

| Tahun | Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) | Urbanisasi / Migrasi Masuk (Ribuan Jiwa) | Kesempatan Kerja (Ribuan Jiwa) |
|-------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2009 | 1.272.349 | 19.030 | 522.462 |
| 2010 | 1.339.374 | 21.244 | 507.962 |
| 2011 | 1.352.136 | 22.188 | 541.050 |
| 2012 | 1.369.606 | 20.520 | 502.308 |
| 2013 | 1.408.072 | 16.134 | 513.428 |
| 2014 | 1.429.242 | 35.711 | 534.428 |
| 2015 | 1.449.401 | 63.828 | 521.854 |
| 2016 | 1.469.601 | 140.718 | 579.971 |
| 2017 | 1.489.011 | 152.066 | 597.934 |
| 2018 | 1.508.154 | 41.642 | 532.901 |
| 2019 | 1.526.677 | 26.134 | 524.857 |
| 2020 | 1.423.877 | 25.007 | 467.209 |

Sumber: BPS Kota Makassar

Dilihat dari data urbanisasi kota Makassar, pada tahun 2015 meningkat sebesar 63.828 jiwa, namun terlihat pada data penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama mengalami penurunan menjadi 521.854 jiwa, seharusnya peningkatan urbanisasi diikuti dengan peningkatan tenaga kerja yang terserap, karena apabila para urban tidak memperoleh pekerjaan, itu berarti mereka akan menganggur yang justru akan menekan standar hidup daerah tersebut menjadi lebih rendah (Jhingan, 2004).

Tingginya migrasi ke daerah perkotaan menyebabkan tidak meratanya distribusi penduduk atau persebaran penduduk daerah lain. Akibatnya, kepadatan penduduk di daerah perkotaan semakin meningkat dan diperburuk lagi karena tidak sebanding antara konsentrasi penduduk dan kecepatan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan suatu fenomena yang dikenal sebagai urbanisasi berlebih (Sukirno, 2012). Urbanisasi berlebih yang tidak terkendali telah menimbulkan masalah baru di perkotaan seperti meningkatnya tindak kriminal, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi dapat dikatakan sebagai faktor penentu bagi sebuah kota yang berkembang baik secara struktur ekonomi maupun sosial.

Tingginya angka migrasi disebabkan karena adanya faktor-faktor penarik dan pendorong yang menyebabkan penduduk pedesaan melakukan perpindahan ke daerah perkotaan. Faktor daya tarik kota (*pull factor*) adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih besar, fasilitas kehidupan yang lebih lengkap seperti pendidikan, kesehatan dan hiburan, dan upah kerja yang lebih tinggi. Adapun faktor daya dorong urbanisasi (*push factor*) adalah makin berkurangnya lahan pertanian di desa akibat pembangunan, upah kerja yang kecil, fasilitas kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan yang kurang

baik atau terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir yang merusak rumah ataupun lahan pertanian.

Kota Makassar merupakan Ibu Kota provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat perekonomian yang cenderung berkembang pesat. Sebagai daerah urban yang pesat oleh pembangunan dan perkembangan, Kota Makassar menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah lain untuk melakukan urbanisasi. Daerah perkotaan memang tidak dapat di pungkiri lagi berperan sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi” , dimana pesatnya pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Makassar menyebabkan perbedaan tingkat upah yang cukup jauh dibandingkan upah pada sektor pertanian di pedesaan, sehingga sebagian besar penduduk yang menginginkan peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik memilih pindah ke wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi urbanisasi di kota Makassar, maka akan ditinjau dari karakteristik kota Makassar seperti PDRB, upah minimum, dan kesempatan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diadakan penelitian mengenai seberapa besar faktor tersebut memengaruhi para urban yang datang ke Kota Makassar. Adapun judul dalam penelitian ini adalah: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Urbanisasi di Kota Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pembahasan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap urbanisasi di Kota Makassar?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap urbanisasi di Kota Makassar?
3. Apakah kesempatan kerja berpengaruh terhadap urbanisasi di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap urbanisasi di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap urbanisasi di Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kesempatan kerja terhadap urbanisasi di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian faktor-faktor yang memengaruhi urbanisasi di Kota Makassar, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya mengenai urbanisasi.
2. Dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran dan menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Dapat menjadi referensi dan juga sebagai perbandingan antar penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritik

2.1.1. Teori Urbanisasi

Urbanisasi berasal dari kata *Urban* yang artinya sifat kekotaan. Urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses terbentuknya kehidupan perkotaan yang berbeda dengan kehidupan pedesaan, dalam konteks ekonomi, sosial dan mentalitas masyarakatnya (Soetomo, 2009). Semakin besar kotanya, semakin cepat proses urbanisasinya, sehingga memunculkan konsep "*Primate City*". Hal ini lah yang terjadi di Kota Makassar saat ini, yaitu berduyun-duyunnya masyarakat desa ke kota sehingga daerah perkotaan semakin padat penduduk.

Dalam literatur pembangunan ekonomi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dipandang sebagai berkah, karena surplus tenaga kerja di daerah pedesaan secara perlahan lahan ditarik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkotaan seiring dengan makin berkembangnya sektor industri (Todaro, 2003). Proses tersebut dianggap memberikan keuntungan dari segi sosial, karena angkatan kerja dipindahkan dari lokasi lokasi dimana produk marjinal mereka boleh dikatakan nol, ketempat yang produk marjinalnya bukan hanya positif, tetapi juga lebih cepat berkembang sebagai hasil dari akumulasi modal dan kemajuan dibidang teknologi.

1. Teori Arthur Lewis

Lewis mengembangkan satu model/teori yang mendukung bahwa migrasi desa kota merupakan berkah (Todaro, 2003). Teori Lewis berfokus pada transformasi struktural subsistem primer yang dimaknai sebagai proses

perubahan perekonomian yang sedemikian rupa sehingga kontribusi sektor industri dan manufaktur terhadap pendapatan nasional akhirnya melampaui kontribusi sektor pertanian. Secara umum hal ini berarti suatu perubahan besar terhadap komposisi industri dalam suatu perekonomian.

Model dua-sektor Lewis (*Lewis two-sector model*) adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional di transfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja di desa, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Dalam teorinya Lewis menyebutkan bahwa ekonomi terdiri dari dua sektor. Pertama, sektor subsistem pedesaan tradisional. Sektor ini ditandai oleh produktivitas yang sangat rendah atau nol. Kedua, sektor industri perkotaan modern dengan produktivitas tinggi. Dua hal yang berbeda tersebut mengakibatkan terjadinya aliran tenaga kerja dari daerah pedesaan menuju ke perkotaan. Proses pertumbuhan sektor modern dan perluasan kesempatan kerja akan berlanjut terus sampai semua surplus tenaga kerja di pedesaan terserap oleh sektor perekonomian modern di perkotaan.

Fokus utama dari model ini adalah pada proses distribusi tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor industri modern. Distribusi tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena adanya ekspansi output yang dihasilkan oleh sektor industri modern yang jauh lebih menguntungkan dibanding sektor subsistem pedesaan tradisional.

2. Teori Kependudukan Malthus

Malthus menyatakan dalam edisi pertamanya *Essay on Population* tahun 1798 mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu; (a) Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia, (b) nafsu manusia tak dapat ditahan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur

sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, dimana yang dimaksud adalah bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup (Conway, 2015). Desakan pemenuhan kebutuhan inilah yang juga turut andil dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan perpindahan ke daerah yang lebih berpotensi dalam peningkatan taraf hidup.

Secara umum, Urbanisasi (*Urbanization*) berarti bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan daerah kota. Definisi urban berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lainnya tetapi biasanya pengertiannya berhubungan dengan kota-kota atau daerah-daerah pemukiman lain yang padat. Klasifikasi yang dipergunakan untuk menentukan daerah kota biasanya dipengaruhi oleh indikator mengenai penduduk, indikator mengenai kegiatan ekonomi, indikator jumlah fasilitas urban atau status administrasi suatu pemukiman penduduk. Urbanisasi sendiri merupakan bagian dari mobilitas penduduk dari migrasi dan transmigrasi. Paul Knox merumuskan bahwa urbanisasi sebagai proses yang dimotori oleh perubahan ekonomi yang mendorong dan didorong oleh faktor-faktor manusia, sumber daya alam dan teknologi (sumber daya buatan) dan menghasilkan keluaran keadaan ekonomi, sosial dan fisik serta masalah-masalah yang menjadi bahan yang harus diatasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kota (Soetomo, 2009).

Dari beberapa pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perpindahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat didalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi,

sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya (Moertiningsih dan Bulan, 2015).

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Beberapa ekonom seperti Everett Lee dan Michael P Todaro berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Todaro menyebut motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional (Mantra, 2003). Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Oleh karena itu mobilitas desa-kota mencerminkan ketidakseimbangan antara kedua daerah tersebut. Dengan demikian arah pergerakan penduduk cenderung ke kota yang memiliki kekuatan relatif besar sehingga diharapkan dapat memenuhi pamrih ekonomi mereka.

Selanjutnya Lee menambahkan bahwa banyak sedikitnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh rintangan antara, seperti biaya pindah yang tinggi, jarak yang jauh, dan transportasi yang terbatas. Faktor yang tidak kalah penting dari keputusan melakukan migrasi adalah faktor individu. Faktor inilah yang menilai positif dan negatif suatu daerah dan/atau menentukan daerah tujuan. Oleh karena itu Lee menyebutkan proses migrasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: (a) faktor individu, (b) faktor-faktor di daerah asal, (c) faktor-faktor di daerah tujuan, dan (d) rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan (Lee, 2000).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui angka PDRB wilayah tersebut. Konsep PDRB menurut Sukirno adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu yang di produksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga

negara dan negara asing. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah (Sukirno, 2013).

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2012) yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, serta pajak tidak langsung. Pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga,

konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi), pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga tetap (konstan) tahun 2010. Struktur perekonomian pada suatu wilayah digambarkan oleh besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan total PDRB.

Perekonomian suatu wilayah dapat dikatakan cukup mapan jika salah satu cirinya adalah apabila struktur ekonomi suatu wilayah didominasi sektor tersier. Semakin besar peranan sektor tersier dalam pembentukan PDRB suatu wilayah, menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin mapan ekonominya. Pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut (Adiatmojo, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: (a) produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa; (b) domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan; (c) regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa

memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan;(d)bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan (Saberan, 2002).

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Defenisi ini tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional nyata dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi tetapi kemunduran. Jadi, kelonggaran harus diberikan pada perubahan dalam pendapatan nasional nyata akibat pasang naik siklus dan perubahan dalam nilai uang serta pertumbuhan penduduk (Jhingan, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. Berdasarkan analisis makro Produk Domestik Regional Bruto, secara umum PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Mankiw, 2007).

2.1.3. Upah Minimum

2.1.3.1. Teori Upah

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sukirno, 2013). Defenisi lain dari upah yaitu sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksimengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.
- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin

dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

1. Teori Kenaikan Upah Ricardo

David Ricardo menjelaskan bahwa tingkat upah adalah bentuk balas jasa bagi tenaga kerja untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Perbaikan upah juga hanya ditentukan oleh kinerja dan perilaku tenaga kerja sendiri dan pembentukan upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah sesuai kodrat hidup. Oleh para ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Teori upah David Ricardo, mempertimbangkan kondisi pekerja yaitu apabila standar hidup meningkat maka seharusnya tingkat upah yang dibayarkan juga akan meningkat. Hal ini merupakan bentuk antisipasi terhadap perubahan perekonomian secara menyeluruh pada suatu wilayah.

Ricardo mencoba menunjukkan bahwa hanya dalam kondisi lain pemupukan modal akan mengurangi keuntungan. Di dalam sistem Ricardo, upah memainkan peranan aktif dalam menentukan pendapatan antara modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat bila harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. (Jhingan, 2014).

2. Cadangan Upah Mill

Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal, Karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal yang berputar dengan

penduduk yang bekerja. Upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal yang dipakai untuk mengupah tenaga kerja atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik, maka penawaran tenaga kerja akan naik. (Jhingan,2014).

3. Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 2011).

Di Indonesia, baru-baru ini pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan..Dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No. 36/2021, upah minimum didefinisikan sebagai "upah bulanan terendah yang meliputi upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum".

Menurut Kusnaini, upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya.

Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled* (Sholeh, 2007).

Kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pada pasar tenaga kerja (Waisgrais, 2003). Selain itu, dalam penelitiannya Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Sehingga implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif (Sulistiawati, 2012).

Kekakuan upah (*wage rigidity*) terjadi karena gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya sehingga mengakibatkan pengangguran. Kekakuan upah ini terjadinya sebagai akibat dari undang-undang upah minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan (Mankiw, 2003).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau *demand* dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam teori ekonomi neoklasik, penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat.

4. Upah Minimum Kota (UMK)

Upah Minimum Kota (UMK) adalah upah bulanan terendah bagi pekerja atau buruh yang bekerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari, atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

UMK adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten yaitu upah minimum yang berlaku di sebuah wilayah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum yaitu : (a), Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja, dan (b), Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga (Sumarsono, 2009).

2.1.4. Kesempatan Kerja

Pembangunan berbagai infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang terus meningkat dapat menyebabkan semakin besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk akan semakin besar pula kebutuhan akan kesempatan kerja. Dalam perhitungan besarnya sebuah kesempatan kerja untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja.

Lewis dalam teorinya mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah, di mana kelebihan pekerja satu sektor ekonomi akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan

pekerja di sektor lain. Lebih murah biaya upah asal pedesaan terutama dari sektor pertanian akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, maka kelebihan penawaran pekerja di sektor pertanian akan terserap (Hill, 2002).

Dalam ilmu ekonomi kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Kesempatan kerja juga dapat didefinisikan sebagai lapangan pekerjaan yang sudah di duduki (*employment*) dan masih lowongan (*vacancy*). Dalam teori kesempatan kerja dikenal istilah elastisitas permintaan tenaga kerja yang di artikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan permintaan akan tenaga kerja yang di sebabkan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah (Sumarsono, 2003). Dalam *Human Capital Model* niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini, keputusan seseorang untuk melakukan migrasi merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik (Todaro, 2011).

Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Strategi pembangunan dan sasaran tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam

memasuki lapangan kerja. Orientasi untuk peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) harus terlebih dahulu diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan yang memadai agar dalam pembangunan tersebut peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja.

Secara agregat jumlah orang yang bekerja yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik hasil sensus, SUPAS, atau Sakernas. Jumlah ini sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja (Lilimantik, 2016).

Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan. Jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak.

Kesempatan kerja juga berarti sebagai suatu keadaan yang merefleksikan berapa banyak dari total angkatan kerja yang dapat diserap serta aktif dalam suatu kegiatan perekonomian. Dengan kata lain kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja atau telah mendapatkan pekerjaan. Selain itu ada juga pandangan yang didasarkan pada data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada. Ini berarti bahwa kesempatan kerja bukanlah lapangan pekerjaan yang masih terbuka, walaupun komponen yang terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang.

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Jhingan, 2014). Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja dapat diukur berdasarkan total jumlah orang yang bekerja pada semua sektor ekonomi.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan PDRB terhadap Urbanisasi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, penyajian PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Apabila tingkat PDRB meningkat maka akan memengaruhi terjadinya urbanisasi ke kota Makassar, seperti yang dikemukakan oleh Mankiw, bahwa secara umum PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan

ukuran kemakmuran ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan *output* barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi dengan meningkatnya nilai PDRB maka suatu daerah dapat dikatakan makmur dan lebih berpotensi menarik penduduk untuk melakukan urbanisasi.

2.2.2. Hubungan Upah Minimum terhadap Urbanisasi

Upah merupakan pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Sedangkan variabel yang diteliti oleh peneliti disini adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu daerah atau kota, dimana yang dimaksud upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi / regional berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi / upah minimum regional, tetapi untuk fokus penelitian ini akan digunakan upah minimum kota, yaitu upah minimum Kota Makassar.

Dari keadaan Kota Makassar yang mengalami pertumbuhan ekonomi stabil dengan dilihatnya perkembangan PDRB dari tahun ke tahun berikutnya, dapat dikatakan bahwa jika tarif upah minimum meningkat maka akan menyebabkan tingkat urbanisasi meningkat. Ini dikarenakan pelaku urban berpikir bahwa dengan adanya tarif upah minimum di kota tujuan mereka, maka mereka akan lebih aman bekerja karena upah dari hasil kerja mereka terjamin dan sudah dipastikan akan mendapatkan sesuai tarif yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Seperti dalam ekonomi neoklasik bahwa

penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah.

Tarif upah minimum sendiri menjadi penentu keputusan seseorang melakukan urbanisasi karena dapat dibandingkan dengan tarif upah minimum di kabupaten atau kota lainnya, seperti halnya tarif UMR di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan memiliki perbedaan yaitu Sulawesi Barat tahun 2015, Rp.1.655.500,00 sedangkan tahun 2016 menjadi Rp.1.864.000,00 berbeda dengan Sulawesi Selatan yang memiliki tarif UMR cukup tinggi yaitu tahun 2015, Rp.2.000.000,00 sedangkan tahun 2016, Rp.2.250.000,00 dan pada tahun 2017, Rp.2.435.625,00. Hal inilah yang menjadi pemacu terjadinya peningkatan urbanisasi di Kota Makassar.

2.2.3. Hubungan Kesempatan Kerja terhadap Urbanisasi

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Persepsi masyarakat mengenai daerah perkotaan yang banyak memberikan kesempatan kerja, membuat kebanyakan masyarakat daerah pedesaan memilih meninggalkan daerahnya dan melakukan migrasi ke daerah perkotaan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dari pada di daerah asalnya.

Dengan adanya informasi peluang kerja atau kesempatan kerja maka hal ini dapat menarik para pelaku tenaga kerja baik itu yang masih mencari pekerjaan maupun yang sudah memiliki pekerjaan. Selain itu, dengan semakin

banyaknya orang yang diterima kerja juga menandakan besarnya kesempatan kerja disuatu wilayah. Dengan begitu pelaku urban akan terus-menerus berdatangan dari daerah berbagai daerah ke Kota Makassar guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka yang sudah siap bekerja akan berlomba-lomba mencari pekerjaan yang disediakan oleh para pelaku usaha di Kota Makassar. Karena itulah kesempatan kerja sangat memengaruhi terjadinya Urbanisasi di Kota Makassar.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga mempermudah dalam pemahaman untuk melakukan penelitian atas dasar memperkaya pengetahuan dari peneliti sebelumnya. Berikut uraian ringkas hasil peneliti terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Dewi Rustariyuni (2013), yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migran Melakukan Mobilitas Non Permanen ke Kota Denpasar”. Metode penelitian ini menggunakan data primer dengan alat analisis *binary logistic* karena variabelnya bersifat dikotomi yaitu menggunakan variabel dummy, variabel bebasnya merupakan kombinasi antara matrik dan numerik (non-numerik). Hasil penelitian yaitu variabel umur, tingkat pendidikan, lama melakukan mobilitas dan upah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan minat melakukan mobilitas ke Kota Denpasar. Variabel tingkat pendidikan dan upah secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan minat melakukan mobilitas ke Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh BudiHandriawan (2011), yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Melakukan Mobilitas Non Permanen Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia (Studi Kasus TKI Yang Pulang Di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)”. Dalam

analisis menggunakan analisis deskriptif persentase dan uji hipotesis menggunakan uji simultan dan uji parsial. Hasil penelitian deskriptif menjelaskan bahwa persentase secara parsial faktor pendorong dari daerah asal berpengaruh signifikan terhadap mobilitas non permanen menjadi TKI ke Malaysia dengan kontribusi sebesar 22,20%, dan faktor penarik dari daerah tujuan berpengaruh signifikan terhadap mobilitas non permanen menjadi TKI ke Malaysia dengan kontribusi sebesar 30,50%.

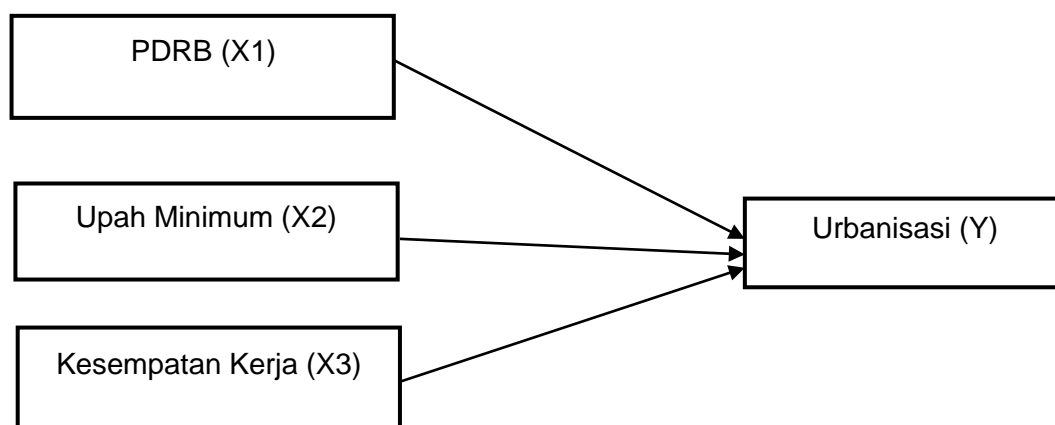
Penelitian yang dilakukan oleh Aris Agusta (2013), yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas penduduk Ke Desa Kota Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk ke Desa Kota Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah faktor ekonomi. Penghasilan ditempat asal sangat berbeda jauh dengan tempat tujuan. Jika di daerah asal mereka bisa mendapatkan Rp.1.300.000,00 sementara ditempat tujuan mereka bisa mendapatkan Rp 2.700.000,00 perbedaan yang signifikan inilah yang menarik penduduk untuk melakukan mobilitas ke Desa Kota Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Kartika Rerungan (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Migran Masuk Risen (kasus 4 Provinsi di Sulawesi)”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2000, 2005 dan 2010. Variabel independennya adalah upah atau UMP, kesempatan kerja, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah sedangkan variabel dependennya adalah jumlah

penduduk migran masuk risen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upah/UMP, kesempatan kerja, dan investasi serta pengeluaran pemerintah pada tahun 2000-2005, berpengaruh positif hanya pada provinsi Sulawesi Selatan saja. Pada tahun 2005-2010 upah/UMP, kesempatan kerja dan investasi menunjukkan pengaruh yang positif pada ke 4 provinsi. Namun pada tahun 2005-2010 pengeluaran pemerintah berpengaruh positif hanya pada provinsi Sulawesi Utara.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antar variabel diatas, maka dapat disusun kerangka pikir penelitian dalam bentuk skema yang menjelaskan pengaruh antar variabel, dimana : Y (Urbanisasi) menjadi variabel dependen yang dipengaruhi atau menjadi 'akibat' karena adanya X1, X2, dan X3 yang bertindak memberi pengaruh atau sebagai 'sebab' terjadinya perubahan pada variabel Y.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Skema di atas menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi di Kota Makassar, yaitu: PDRB, upah minimum, dan kesempatan kerja.

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah :

1. Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi di Kota Makassar.
2. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi di Kota Makassar.
3. Diduga bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi di Kota Makassar.